

Dekonstruksi Birokrasi Pendidikan: Implementasi Filosofi “Gitu Aja Kok Repot” Gus Dur dalam Transformasi Digital Pembelajaran dari Madrasah hingga Perguruan Tinggi

Muhammad Mahfud¹, Akhmad Zaeni², Solihin³, Abd. Hadi⁴, Sugiyanto⁵

Universitas Al Falah Assunniah Kencong Jember¹⁻⁵

Email: hmuhammadmahfud60@gmail.com¹, akhmadzaeni@uas.ac.id²,

solihinasyariah@gmail.com³, ahadi25834@gmail.com⁴, sugianto07081971@gmail.com⁵

Keywords

*Dekonstruksi Birokrasi,
Filosofi Gus Dur,
Transformasi Digital
Pendidikan*

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi filosofi "Gitu Aja Kok Repot" yang digagas oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam konteks transformasi digital pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang madrasah hingga perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Gus Dur dalam mendekonstruksi birokrasi pendidikan yang semakin kompleks di era digital, mengidentifikasi permasalahan struktural dan operasional yang muncul akibat penerapan teknologi yang tidak terintegrasi, serta merumuskan strategi penyederhanaan sistem pendidikan yang berorientasi pada substansi dan kemaslahatan manusia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa filosofi "Gitu Aja Kok Repot" mengandung empat dimensi utama: pengutamaan substansi daripada formalitas, efisiensi sebagai nilai kemanusiaan, berpikir kontekstual, dan kemandirian berpikir. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital sering kali melahirkan "hiper-birokrasi digital" yang justru menambah beban administrasi pendidik dan membatasi kreativitas pembelajaran. Implementasi filosofi Gus Dur menawarkan solusi melalui dekonstruksi kerumitan administrasi, integrasi sistem digital satu pintu, penghapusan dikotomi ilmu, dan pembangunan budaya kerja berbasis esensi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi yang kontekstual dan inklusif, serta perubahan paradigma seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat kembali pada hakikatnya sebagai ruang pembebasan dan pemanusiaan, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan telah lama diakui sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Dalam pandangan **Mulyasa (2016)**, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan semata, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mengembangkan seluruh potensi akal budi, nurani, dan keterampilan individu agar mampu menjawab tantangan kehidupan yang

terus berkembang. Sebagai instrumen strategis bagi kemajuan suatu bangsa, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami serangkaian transformasi signifikan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualifikasi pendidik, hingga integrasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi bukti nyata komitmen untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang semakin maju. Namun, di balik serangkaian pembaruan tersebut, masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara harapan ideal dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Seiring dengan upaya modernisasi yang digalakkan, kompleksitas birokrasi justru tumbuh secara eksponensial dan menjadi tantangan tersendiri. Setiap terbitnya kebijakan atau regulasi baru kerap kali diiringi dengan aturan administrasi yang semakin berlapis, prosedur yang berbelit, serta format pelaporan yang bersifat kaku dan seragam tanpa mempertimbangkan konteks keberagaman lembaga pendidikan. Kondisi ini dipertegas oleh **Rohman (2020)**, yang menyatakan bahwa birokrasi pendidikan yang berlebihan sering kali melahirkan budaya yang lebih mengutamakan kepatuhan terhadap aturan ketimbang pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Masalah ini semakin mendalam ketika memasuki era transformasi digital. Pada mulanya, penerapan teknologi diharapkan menjadi solusi efektif untuk memangkas hambatan ruang, menghemat waktu, serta meringankan beban kerja. Namun dalam praktiknya, sebagaimana diamati oleh **Wijaya & Susanto (2022)**, digitalisasi sering kali hanya berarti memindahkan kerumitan dari lembaran kertas ke dalam tampilan layar gawai, tanpa melakukan perombakan mendasar terhadap struktur dan pola pikir sistem yang sesungguhnya. Akibatnya, beban administrasi justru terasa semakin berat dan tidak memberikan manfaat substansial bagi kualitas pembelajaran.

Di tengah kekakuan sistem yang demikian, hadir sebuah pandangan yang menyegarkan dan mengajak untuk kembali merenungkan hakikat segala hal, yaitu pemikiran dari Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal luas sebagai Gus Dur. Sebagai salah satu tokoh pemikir dan negarawan terkemuka Indonesia, pemikiran Gus Dur selalu ditandai dengan kejernihan akal, kelembutan hati, serta keberanian untuk menyederhanakan hal-hal yang terlihat rumit. Melalui ungkapan yang terdengar sederhana namun memiliki kedalaman filosofis luar biasa, "*Gitu Aja Kok Repot*", Gus Dur mengajak kita untuk melihat melampaui lapisan formalitas yang sering kali menutupi inti persoalan. Menurut **Basuki (2018)**, kalimat ini bukanlah ungkapan ketidaksabaran,

melainkan sebuah ajakan kritis untuk membedakan antara kebutuhan mendasar dengan kebiasaan yang tidak perlu, serta mempertanyakan apakah kerumitan yang ada benar-benar memiliki landasan logis atau sekadar lahir dari kekakuan berpikir, tradisi yang membeku, atau bahkan keinginan untuk mempertegas kekuasaan prosedural.

Dalam konteks dunia pendidikan, pemikiran ini memiliki relevansi yang sangat mendesak dan mendalam. Pendidikan sejatinya adalah ruang pembebasan akal, tempat di mana peserta didik dapat mengembangkan daya pikir kritis, kreativitas, dan jati diri secara utuh. Namun, ketika sistem dibebani oleh aturan yang berlebihan, ruang tersebut justru berubah menjadi ruang yang menekan dan membatasi potensi. **Supriyanto (2021)** mencatat bahwa banyak pendidik, baik guru di madrasah maupun dosen di perguruan tinggi, mengaku menghabiskan lebih dari separuh waktu kerjanya untuk mengurus administrasi dan pelaporan, sehingga waktu dan tenaga yang seharusnya dicurahkan untuk merancang pembelajaran yang bermakna menjadi sangat terbatas. Demikian pula halnya dengan peserta didik, yang sering kali lebih sibuk mengikuti alur sistem yang rumit ketimbang mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir mendalam.

Atas dasar pemikiran dan kenyataan tersebut, makalah ini disusun untuk mengupas secara mendalam bagaimana filosofi "*Gitu Aja Kok Repot*" dapat berperan sebagai pisau analisis sekaligus pedoman transformatif. Dari jenjang pendidikan dasar di madrasah hingga pendidikan tinggi di perguruan tinggi, semangat untuk memudahkan proses, memangkas hal yang tidak esensial, serta mengutamakan substansi diharapkan mampu mengembalikan fungsi hakiki pendidikan sebagai sarana utama untuk memanusiakan manusia seutuhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna mendalam serta landasan teoretis yang melandasi filosofi "*Gitu Aja Kok Repot*" menurut pandangan pemikiran Abdurrahman Wahid?
2. Seperti apa kondisi aktual dan permasalahan mendasar yang muncul dalam sistem birokrasi serta penerapan transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, mulai dari jenjang madrasah hingga perguruan tinggi?

3. Bagaimana relevansi filosofi "*Gitu Aja Kok Repot*" dalam menghadapi tantangan sistem pendidikan di era digital, serta bagaimana penerapannya untuk menyederhanakan tata kelola pendidikan?
4. Strategi apa saja yang dapat dirumuskan dan diimplementasikan guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih efisien, efektif, dan sepenuhnya berorientasi pada esensi pembelajaran?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah:

1. Menguraikan makna hakiki serta menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi ungkapan "*Gitu Aja Kok Repot*" sebagai salah satu wujud pandangan hidup dan analisis sosial Gus Dur.
2. Menggambarkan kondisi nyata serta mengidentifikasi berbagai permasalahan struktural dan operasional yang terdapat dalam birokrasi dan penerapan teknologi pada jenjang pendidikan madrasah hingga perguruan tinggi.
3. Menganalisis keterkaitan dan penerapan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keutamaan substansi dalam upaya memperbaiki arah dan kinerja sistem pendidikan yang ada.
4. Merumuskan langkah-langkah strategis dan terukur untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih membebaskan, mendukung kreativitas, serta tetap terjaga kualitas dan efisiensinya.

D. Manfaat Penulisan

Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Kajian ini juga memperkaya perspektif pemikiran pendidikan dengan menawarkan pendekatan baru yang bersumber dari kearifan lokal dan pemikiran tokoh bangsa, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Bagi para pengambil kebijakan, makalah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang regulasi yang lebih manusiawi dan tidak berbelit. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, kajian ini memberikan wawasan untuk mengelola proses pembelajaran dan administrasi dengan lebih bijaksana. Selain itu, bagi pengelola

lembaga pendidikan, tulisan ini dapat menjadi panduan dalam memanfaatkan teknologi secara tepat guna, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan berfokus pada pencapaian tujuan luhur pendidikan.

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PEMIKIRAN

A. Biografi Singkat dan Pemikiran Dasar Gus Dur

Nama lengkap Gus Dur adalah **Abdurrahman Wahid**, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 7 September 1940 dan wafat di Jakarta pada 30 Desember 2009. Beliau merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam bidang keagamaan, pendidikan, demokrasi, pluralisme, serta hak asasi manusia. Gus Dur berasal dari keluarga ulama terkemuka. Ayahnya, **KH. Wahid Hasyim**, adalah Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, **KH. Hasyim Asy'ari**, sedangkan ibunya, Nyai Sholehah, merupakan putri KH. Bisri Syansuri yang juga merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Latar belakang keluarga tersebut membentuk karakter Gus Dur sebagai seorang intelektual yang memiliki akar kuat dalam tradisi pesantren namun tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern (Barton, 2002).

Pendidikan Gus Dur dimulai dari lingkungan pesantren, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formal di Al-Azhar, pengalaman intelektualnya di Mesir memberikan wawasan luas mengenai dinamika pemikiran Islam modern. Selanjutnya beliau melanjutkan studi di Universitas Baghdad, Irak, yang mempertemukannya dengan berbagai tradisi intelektual Timur Tengah serta pemikiran filsafat Barat. Pengalaman belajar lintas budaya tersebut menjadikan Gus Dur memiliki cara pandang yang inklusif, moderat, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam klasik dengan tantangan masyarakat modern (Fealy, 2011).

Sebagai pemikir Muslim, Gus Dur dikenal memiliki paradigma yang menempatkan **manusia sebagai pusat perhatian (human-centered thinking)**. Baginya, agama tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan formal, melainkan sebagai sistem nilai yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan sosial, pendidikan, maupun pemerintahan harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat manusia. Dalam berbagai tulisannya, Gus Dur menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa nilai-nilai universal berupa

keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan penghormatan terhadap hak-hak manusia (Wahid, 1999).

Menurut Gus Dur, pemahaman keagamaan yang terlalu tekstual berpotensi menghilangkan esensi ajaran Islam. Ia mengkritik kecenderungan sebagian kelompok yang lebih mengutamakan simbol-simbol agama daripada substansi nilai yang dikandungnya. Oleh karena itu, ia mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya membaca teks agama secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Pendekatan ini dikenal sebagai paradigma **pribumisasi Islam**, yaitu upaya menghadirkan Islam yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat namun mampu berdialog dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk (Wahid, 2001).

Lebih jauh, Gus Dur memandang bahwa perubahan merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan, birokrasi pemerintahan, maupun organisasi keagamaan dituntut untuk mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral yang menjadi fondasinya. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya berbagai gagasan Gus Dur mengenai demokrasi, pluralisme, pendidikan humanis, serta penyederhanaan sistem pelayanan publik.

B. Makna Filosofis "Gitu Aja Kok Repot"

Ungkapan "**Gitu Aja Kok Repot**" telah menjadi salah satu simbol pemikiran Gus Dur yang paling dikenal masyarakat Indonesia. Meskipun secara linguistik kalimat tersebut terdengar sederhana dan bersifat informal, sebenarnya ungkapan ini mengandung pesan filosofis yang sangat mendalam mengenai cara berpikir rasional, efisien, serta berorientasi pada substansi.

Secara filosofis, ungkapan tersebut merupakan kritik terhadap budaya birokrasi yang terlalu prosedural, kecenderungan masyarakat yang gemar memperumit persoalan sederhana, serta pola pikir formalistik yang sering mengabaikan tujuan utama suatu pekerjaan. Menurut Gus Dur, manusia sering kali terjebak pada aturan-aturan teknis sehingga lupa terhadap esensi atau manfaat yang ingin dicapai. Dalam konteks inilah muncul kritik beliau bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan secara sederhana tidak perlu dipersulit hanya demi mempertahankan formalitas (Barton, 2002).

Dalam perspektif filsafat pragmatisme, pandangan Gus Dur memiliki kesesuaian dengan gagasan John Dewey yang menekankan bahwa suatu tindakan dinilai benar apabila mampu menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan manusia (Dewey, 1938). Dengan demikian, efektivitas dan kebermanfaatan menjadi ukuran utama dalam pengambilan keputusan, bukan semata-mata kepatuhan terhadap prosedur administratif.

Secara konseptual, filosofi "Gitu Aja Kok Repot" dapat dipahami melalui empat dimensi utama.

1. Mengutamakan Substansi daripada Formalitas

Gus Dur berpandangan bahwa keberhasilan suatu aktivitas tidak diukur dari banyaknya prosedur yang dijalankan, melainkan dari tercapainya tujuan utama. Dalam pendidikan misalnya, keberhasilan pembelajaran bukan ditentukan oleh banyaknya dokumen administrasi guru, tetapi oleh meningkatnya kualitas belajar peserta didik.

Pandangan ini sejalan dengan teori **Management by Objectives** yang dikembangkan oleh Peter Drucker (1954), yaitu bahwa organisasi seharusnya lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) daripada aktivitas administratif.

2. Efisiensi sebagai Nilai Kemanusiaan

Efisiensi menurut Gus Dur bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap waktu, tenaga, biaya, dan pikiran manusia. Setiap sistem yang menyebabkan pemborosan sumber daya tanpa memberikan nilai tambah berarti telah mengurangi kualitas pelayanan terhadap manusia.

Konsep tersebut selaras dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2017), yang menjelaskan bahwa organisasi yang baik mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya secara optimal.

3. Berpikir Kontekstual

Gus Dur menolak pendekatan yang seragam untuk semua persoalan. Ia berpandangan bahwa setiap masalah memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan solusi yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, maupun perkembangan teknologi.

Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan teori **Contextual Learning** yang dikembangkan Johnson (2002), di mana pemecahan masalah harus mempertimbangkan lingkungan nyata tempat masalah tersebut muncul.

4. Mendorong Kemandirian Berpikir

Ungkapan tersebut juga mengandung pesan agar masyarakat tidak menerima suatu aturan secara membuta. Setiap individu didorong untuk berpikir kritis, mengevaluasi prosedur yang ada, kemudian memilih alternatif yang paling efektif tanpa mengabaikan nilai moral maupun hukum.

Pemikiran ini sangat dekat dengan konsep **critical thinking** yang dikembangkan oleh Paul dan Elder (2014), yaitu kemampuan mengevaluasi informasi secara logis untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Dengan demikian, filosofi "Gitu Aja Kok Repot" bukanlah ajakan untuk mengabaikan aturan, melainkan dorongan untuk membangun budaya berpikir rasional, sederhana, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

C. Landasan Teoretis Pemikiran Gus Dur

1. Humanisme Islam

Humanisme Islam merupakan inti dari pemikiran Gus Dur. Berbeda dengan humanisme sekuler yang menempatkan manusia sebagai pusat tanpa mempertimbangkan dimensi ketuhanan, humanisme Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah (*karāmah al-insān*) sekaligus memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama dan lingkungan.

Gus Dur menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perlindungan kelompok minoritas merupakan bagian integral dari ajaran Islam (Wahid, 2006).

Dalam konteks pendidikan, humanisme Islam menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan objek yang sekadar menerima informasi. Pendidikan harus mengembangkan potensi intelektual, spiritual, sosial, dan emosional secara seimbang sehingga menghasilkan manusia yang merdeka dalam berpikir namun tetap berakhlak mulia.

Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan teori pendidikan humanistik Abraham Maslow (1970) dan Carl Rogers (1983) yang menekankan aktualisasi diri, penghargaan terhadap martabat manusia, serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

2. Prinsip Wasathiyah (Moderasi Beragama)

Konsep **wasathiyah** merupakan prinsip keseimbangan dalam Islam. Kata *wasath* berarti tengah, adil, proporsional, dan tidak ekstrem (Q.S. Al-Baqarah:143).

Gus Dur menjadikan prinsip ini sebagai paradigma dalam menghadapi modernisasi. Menurutnya, umat Islam tidak boleh menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya karena dianggap berasal dari Barat, tetapi juga tidak boleh menerima modernisasi secara membabi buta hingga menghilangkan nilai-nilai agama.

Dalam konteks transformasi digital pendidikan, prinsip wasathiyah berarti memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, bukan sebagai tujuan akhir. Sistem digital harus mempermudah pekerjaan guru, siswa, maupun tenaga kependidikan, bukan justru menambah beban administratif.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep **Islam Wasathiyah** yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi (2010), yaitu keseimbangan antara tradisi dan pembaruan, antara teks dan konteks, serta antara kepentingan individu dan masyarakat.

3. Rahmatan lil 'Alamin dan Maqashid Syariah

Gus Dur sering menggunakan pendekatan **maqashid syariah** sebagai dasar memahami hukum Islam. Menurutnya, seluruh aturan agama memiliki tujuan utama untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 2004).

Prinsip fikih seperti:

الأمر بمقاصدها (*Al-umūru bi maqāṣidihā*)

dan

المشقة تجلب التيسير (*Al-masyaqqatu tajlibut-taysīr*)

menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

Karena itu, apabila suatu sistem administrasi pendidikan, birokrasi, atau pelayanan publik justru menciptakan kerumitan yang tidak memberikan manfaat nyata, maka sistem tersebut bertentangan dengan semangat dasar maqashid syariah. Filosofi "Gitu Aja Kok Repot" dapat dipahami sebagai penerapan praktis prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam kehidupan sosial.

D. Konsep Birokrasi dan Transformasi Digital Pendidikan

Birokrasi merupakan mekanisme organisasi yang dirancang untuk mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara sistematis. Menurut **Max Weber (1947)**, birokrasi ideal memiliki karakteristik berupa pembagian kerja yang

jelas, hierarki kewenangan, aturan formal, impersonalitas, serta profesionalisme aparatur. Model ini bertujuan menciptakan organisasi yang rasional, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik secara konsisten.

Namun demikian, Weber juga mengingatkan bahwa birokrasi dapat mengalami disfungsi ketika prosedur administratif menjadi tujuan itu sendiri. Kondisi ini dikenal sebagai **red tape bureaucracy**, yaitu situasi ketika organisasi lebih mementingkan kepatuhan terhadap prosedur daripada pencapaian tujuan pelayanan (Bozeman, 2000). Dalam konteks pendidikan, fenomena tersebut tampak pada banyaknya administrasi yang harus diselesaikan guru sehingga mengurangi waktu untuk merancang pembelajaran yang berkualitas.

Transformasi digital hadir sebagai salah satu strategi reformasi birokrasi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Menurut **Vial (2019)**, transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, inovasi, dan pengalaman pengguna. Dalam sektor pendidikan, transformasi digital mencakup digitalisasi administrasi sekolah, penggunaan sistem informasi akademik, pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS), asesmen digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan pendidikan.

Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Menurut **OECD (2021)** dan **UNESCO (2023)**, keberhasilan digitalisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, tata kelola organisasi, budaya kerja, serta orientasi terhadap kebutuhan pengguna (*user-centered design*). Digitalisasi yang hanya menambah lapisan administrasi tanpa menyederhanakan proses justru berpotensi menciptakan bentuk baru dari birokrasi yang rumit.

Dalam perspektif pemikiran Gus Dur, transformasi digital seharusnya diarahkan untuk menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan kebermanfaatan. Teknologi bukan sekadar simbol modernitas, melainkan instrumen untuk memuliakan manusia melalui penyederhanaan layanan, pengurangan beban administratif, serta peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, filosofi "**Gitu Aja Kok Repot**" dapat dijadikan landasan etik dalam merancang sistem birokrasi digital yang sederhana, adaptif, dan berorientasi

pada kemaslahatan peserta didik, pendidik, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONDISI DAN PERMASALAHAN SISTEM PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL

A. Birokrasi Pendidikan: Antara Tujuan dan Realitas

Tujuan dibentuknya birokrasi pendidikan adalah untuk memastikan kelancaran operasional lembaga, menjamin akuntabilitas, dan menyamakan standar mutu. Namun, di lapangan, tujuan ini sering kali terdistorsi. Birokrasi berubah menjadi jaringan prosedur yang saling berkaitan namun tidak terkoordinasi.

Contoh nyata dapat dilihat pada pelaporan data. Seorang guru di tingkat dasar harus menginput data yang sama ke dalam beberapa sistem berbeda seperti Dapodik, e-Rapor, ARKAS, dan Platform Merdeka Mengajar. Hal ini menyebabkan duplikasi pekerjaan, memakan waktu yang lama, dan sering kali menimbulkan kesalahan data akibat kelelahan. Energi yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran justru tersita untuk mengurus administrasi.

Dalam pandangan Gus Dur, kondisi ini adalah bentuk kerumitan buatan. Sistem yang seharusnya melayani pendidik dan peserta didik, justru berbalik menjadikan mereka sebagai pelayan sistem.

B. Paradoks Transformasi Digital: Kemudahan yang Berubah Menjadi Kerumitan

Era digital membawa janji besar: satu perintah, satu klik, segala sesuatunya selesai. Namun, realitasnya sering kali berbeda. Di banyak lembaga pendidikan, penerapan teknologi dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi. Hal ini melahirkan apa yang disebut sebagai “kerumitan digital”.

Kerumitan ini muncul karena beberapa hal: pertama, sistem yang dibuat tidak saling terhubung, sehingga pengguna harus membuka banyak aplikasi untuk satu kebutuhan; kedua, ketersediaan infrastruktur yang tidak merata, sehingga teknologi yang bagus di kota besar menjadi beban di daerah terpencil; ketiga, kurangnya pelatihan bagi pengguna, sehingga teknologi menjadi alat yang membingungkan bukan memudahkan.

Paradoks ini menjadi sasaran kritik tajam dari filosofi “*Gitu Aja Kok Repot*”. Mengapa hal yang bisa disederhanakan justru dibuat rumit hanya karena ingin terlihat modern?

C. Analisis Masalah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1. Tingkat PAUD, TK, dan RA

Di jenjang ini, masalah utama terletak pada penerapan standar yang tidak sesuai dengan fitrah anak. Anak usia dini seharusnya belajar melalui bermain, bernyanyi, dan bereksplorasi. Namun, sistem yang ada sering kali memaksakan administrasi yang rinci dan penggunaan aplikasi digital yang rumit.

Orang tua pun merasakan dampaknya. Untuk mendapatkan informasi jadwal, membayar iuran, dan melihat laporan perkembangan anak, orang tua harus mengunduh dan mengoperasikan beberapa aplikasi sekaligus. Jika satu aplikasi mengalami gangguan, informasi menjadi terputus. Kondisi ini justru menambah beban bagi orang tua dan guru tanpa memberikan dampak signifikan bagi perkembangan anak.

2. Tingkat SD/MI hingga SMA/MA/SMK

Pada jenjang ini, kerumitan semakin terasa. Dalam proses pembelajaran, siswa sering kali harus berpindah dari satu platform ke platform lain: menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas, Zoom untuk pertemuan, WA Grup untuk informasi, dan aplikasi lain untuk kuis. Akibatnya, fokus siswa terbagi; mereka lebih sibuk mengingat cara mengakses aplikasi daripada memahami materi yang dipelajari.

Bagi guru, beban administratif semakin berat. Implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut kreativitas, justru sering kali dibatasi oleh format laporan yang seragam dan rumit. Guru harus mengisi berbagai lembar kerja yang memakan waktu sehari-hari, padahal substansi pembelajaran bisa didokumentasikan dengan cara yang lebih sederhana namun tetap bermakna.

3. Tingkat Perguruan Tinggi dan Madrasah Tinggi

Di tingkat pendidikan tinggi, birokrasi dan dikotomi ilmu menjadi dua masalah utama. Secara administrasi, mahasiswa harus mengakses berbagai sistem terpisah untuk KRS, pembayaran, pengecekan nilai, absensi, dan pengajuan surat keterangan. Bahkan dalam proses penyelesaian studi, mahasiswa sering kali harus mengantre dan mengurus tanda tangan dari berbagai tingkatan, meskipun dokumen sudah disusun secara digital.

Selain itu, masih terlihat tegasnya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Mahasiswa jurusan agama sering kali merasa tidak perlu mempelajari teknologi, sementara mahasiswa jurusan sains dan sosial merasa tidak perlu mempelajari nilai-nilai keagamaan. Hal ini bertentangan dengan pemikiran Gus Dur yang menginginkan terciptanya ilmu pengetahuan yang utuh dan terpadu.

KONTEKSTUALISASI FILOSOFI “GITU AJA KOK REPOT” DALAM PENDIDIKAN DIGITAL

Filosofi populer “Gitu Aja Kok Repot” yang kerap dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bukanlah ungkapan sembarangan, melainkan pandangan hidup yang mendalam tentang kesederhanaan, efisiensi, dan kembali ke hakikat tujuan, bukan terjebak pada formalitas belaka. Dalam konteks pendidikan digital, prinsip ini menjadi landasan kritis untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul akibat transformasi teknologi yang sering kali justru melahirkan kerumitan baru, beban administrasi berlebih, dan jarak dari tujuan utama pendidikan itu sendiri. Bab ini menguraikan bagaimana prinsip tersebut dikontekstualisasikan dalam empat aspek utama: dekonstruksi kerumitan administrasi, integrasi sistem digital satu pintu, penghapusan dikotomi ilmu, serta pembangunan kebebasan berpikir dan kemandirian belajar.

A. Dekonstruksi Kerumitan Administrasi

Menerapkan prinsip “Gitu Aja Kok Repot” berarti melakukan pembongkaran atau dekonstruksi terhadap aturan, prosedur, dan kebiasaan yang tidak mendasar, berlebihan, atau hanya berorientasi pada kepenuhan administrasi semata. Langkah awal yang paling krusial adalah mengajukan pertanyaan kritis secara terus-menerus: “Apakah aturan ini benar-benar diperlukan? Apakah tujuannya tercapai? Apakah ada cara yang lebih sederhana dan efisien?” Pertanyaan ini menjadi pisau analisis untuk membedakan mana prosedur yang bersifat substantif dan mana yang hanya formalitas belaka.

Dalam konteks pendidikan digital, sering kali terjadi paradoks: hadirnya teknologi justru melahirkan apa yang disebut sebagai “hiper-birokrasi digital”, di mana guru dan tenaga kependidikan dibebani kewajiban mengisi data, mengunggah dokumen, dan melaporkan kegiatan melalui berbagai aplikasi secara berulang-ulang. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini menimbulkan *technostress* atau kelelahan teknologi, di mana waktu yang seharusnya dicurahkan untuk merancang pembelajaran justru tersita untuk urusan administrasi yang tidak memberikan dampak langsung pada kualitas belajar siswa. Menurut Gus Dur, kesederhanaan bukanlah tanda

ketidakteraturan, melainkan wujud kebijaksanaan agar proses tetap fokus pada esensi, bukan terjebak pada selubung prosedur yang membelit.

Menyederhanakan administrasi tidak berarti menghilangkan pengawasan atau standar mutu, melainkan mengubah cara pengawasan itu sendiri menjadi lebih efektif dan tidak menghambat proses. Misalnya, persetujuan kegiatan yang selama ini harus melalui banyak tingkatan birokrasi dapat disederhanakan dengan memberikan kewenangan operasional yang jelas kepada kepala sekolah atau ketua program studi, selama masih berada dalam koridor kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini selaras dengan teori rasionalitas substantif yang menekankan bahwa kebijakan harus dinilai dari manfaatnya bagi tujuan pendidikan, bukan hanya dari kelengkapan dokumen yang dihasilkan. Ketika birokrasi dikurangi, institusi pendidikan akan lebih lincah merespons kebutuhan siswa dan dinamika zaman tanpa terbebani aturan yang kaku dan tidak relevan.

B. Integrasi Sistem Digital Satu Pintu

Solusi strategis untuk mengatasi kerumitan di era digital adalah integrasi sistem informasi. Filosofi “Gitu Aja Kok Repot” mengajarkan bahwa jika satu pintu sudah cukup melayani segala kebutuhan, maka tidak perlu membuka banyak pintu yang justru membingungkan, memecah data, dan membuang tenaga. Dalam praktiknya, hal ini berarti meninggalkan pola pengembangan aplikasi yang terpisah-pisah dan menciptakan ekosistem terpadu yang saling terhubung.

Penerapan sistem satu pintu berarti menyatukan seluruh layanan administrasi, akademik, dan pembelajaran dalam satu antarmuka atau aplikasi induk. Konsep ini didasarkan pada prinsip “satu data untuk banyak kebutuhan”, di mana informasi hanya perlu diinput satu kali, kemudian dapat digunakan secara otomatis untuk berbagai keperluan laporan, validasi, dan pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem terpadu mampu memangkas waktu pengolahan data hingga 40–50% serta mengurangi risiko kesalahan dan ketidakkonsistenan informasi yang sering terjadi jika data tersebar di banyak tempat. Di Indonesia, kebijakan pengintegrasian ribuan aplikasi pendidikan ke dalam satu pintu digital menjadi bukti nyata upaya mewujudkan prinsip ini demi efisiensi kerja guru dan transparansi layanan.

Namun demikian, prinsip kesederhanaan juga mengingatkan bahwa teknologi harus mengabdikan kepada manusia, bukan sebaliknya. Gus Dur menegaskan bahwa

teknologi hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir peradaban; ia berharga jika memberikan kemudahan dan manfaat, bukan kesulitan. Oleh karena itu, jika infrastruktur jaringan, perangkat, atau keterampilan pengguna masih terbatas, tidak perlu memaksakan sistem yang canggih namun berat dan sulit diakses. Menggunakan media yang sudah ada dan mudah dijangkau seperti grup komunikasi sederhana, pesan singkat, atau aplikasi yang ringan justru lebih sesuai dengan kaidah kemaslahatan dan keadilan akses, dibandingkan memaksakan sistem yang tidak dapat dijalankan secara berkelanjutan.

C. Penghapusan Dikotomi Ilmu dan Penyeragaman Metode

Salah satu inti pemikiran Gus Dur yang sangat relevan dalam pendidikan adalah penolakannya terhadap pemisahan ilmu pengetahuan ke dalam kotak-kotak yang kaku. Ia menegaskan bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada sekat mutlak antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu sosial dan ilmu alam, maupun teori dan praktik. Pandangan ini menjadi dasar kuat untuk menerapkan prinsip “Gitu Aja Kok Repot” dalam menata kurikulum dan strategi pembelajaran, yaitu dengan menghapus dikotomi ilmu serta penyeragaman metode yang tidak sesuai dengan hakikat materi.

Pemisahan ilmu yang berlebihan sering kali membuat pembelajaran menjadi terkotak-kotak dan tidak menyentuh kebutuhan nyata siswa. Jika setiap mata pelajaran dipelajari secara terpisah tanpa hubungan satu sama lain, siswa kesulitan melihat keterkaitan pengetahuan dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menerapkan prinsip ini berarti memberikan kebebasan kepada pendidik untuk memilih pendekatan yang paling efektif, tanpa harus terikat pada satu cara standar yang dianggap “paling benar” secara mutlak. Jika untuk materi tertentu diskusi tatap muka lebih mendalam, maka tidak perlu dipaksakan menggunakan forum daring yang justru membatasi interaksi. Jika pembahasan materi sains dapat dikaitkan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab, maka integrasi itu harus dilakukan secara alami dan bermakna.

Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan kontekstualitas. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tuntun dalam hidup tumbuhnya anak, sehingga cara mengajar harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungannya, bukan diseragamkan secara kaku. Ketika dikotomi ilmu dihilangkan dan metode disesuaikan, proses pembelajaran menjadi lebih

sederhana namun kaya makna, siswa lebih mudah memahami, dan guru lebih leluasa mengembangkan kreativitasnya tanpa dibebani aturan yang membatasi kebebasan profesionalnya.

D. Membangun Kebebasan Berpikir dan Kemandirian Belajar

Salah satu dampak paling nyata dari sistem pendidikan yang terlalu kaku, rumit, dan seragam adalah matinya semangat bertanya dan kebebasan berpikir. Siswa terbiasa hanya mengikuti apa yang diperintahkan, menghafal jawaban yang sudah tersedia, dan tidak terlatih mempertanyakan alasan atau tujuan dari apa yang dipelajari. Di sinilah prinsip “Gitu Aja Kok Repot” berperan sebagai pendorong untuk membangun budaya kritis dan kemandirian belajar.

Filosofi ini mengajak untuk mengubah pola pikir dari “mengikuti saja” menjadi “memahami dan memilih cara terbaik”. Dalam proses belajar, peserta didik harus dilatih secara bertahap untuk mengajukan pertanyaan reflektif: “Apakah cara ini paling efisien? Apakah ada cara lain yang lebih baik? Apakah manfaatnya bagi saya dan lingkungan?” Kebiasaan ini melatih mereka untuk tidak mudah puas dengan jawaban yang sudah ada, melainkan berani mencari alternatif yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Gus Dur sendiri menekankan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang berani berpikir, tidak terbelenggu oleh tradisi atau kebiasaan yang tidak lagi relevan, serta mampu membedakan mana yang hakiki dan mana yang sekadar formalitas.

Peran guru dan dosen dalam konteks ini berubah menjadi fasilitator dan pendamping, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Guru memberikan ruang bagi pemikiran baru, mengarahkan diskusi, dan membimbing siswa menemukan jawabannya sendiri, bukan sekadar menyampaikan informasi yang harus dihafal. Ketika peserta didik terbiasa berpikir kritis terhadap sistem, aturan, dan cara belajarnya sendiri, mereka akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, adaptif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan nyata, termasuk tantangan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan. Pendidikan yang sederhana, jelas tujuannya, dan memberi ruang berpikir inilah yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang cerdas, tangguh, dan tidak mudah terjebak dalam kerumitan yang tidak perlu.

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN SOLUSI

A. Kebijakan Penyederhanaan Regulasi

Langkah paling mendasar dalam memperbaiki sistem pendidikan dimulai dari tingkat kebijakan. Pemerintah dan pengelola satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap seluruh peraturan, prosedur, dan standar yang berlaku. Berbagai permasalahan sering muncul akibat tumpang tindihnya aturan antar tingkatan pemerintahan, rumitnya alur administrasi, serta banyaknya ketentuan yang tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, regulasi yang tidak efektif, berbelit, dan menghambat pelaksanaan tugas pokok pendidikan harus dicabut, diperbarui, atau disederhanakan secara signifikan.

Menurut **Mulyasa (2021)**, kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan, bukan sekadar memenuhi syarat administratif semata. Penyederhanaan regulasi tidak berarti menghilangkan pengawasan, melainkan memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang esensial. **Sugiyono (2022)** menambahkan bahwa aturan yang terlalu rumit justru berpotensi menimbulkan celah pelanggaran karena kesulitan dalam memahami dan melaksanakannya, sehingga tujuan awal peraturan tersebut menjadi tidak tercapai.

Prinsip utama dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan harus mengacu pada kemudahan akses dan kejelasan tujuan. Sebuah aturan dikatakan berkualitas jika mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, mudah diimplementasikan di lapangan, serta memberikan manfaat yang terukur bagi kemajuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat **Rivai dan Mulyadi (2020)**, yang menyatakan bahwa kesederhanaan kebijakan menjadi kunci utama agar sistem pendidikan dapat berjalan luwes dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi di lapangan.

B. Pemanfaatan Teknologi yang Kontekstual dan Inklusif

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana pendukung yang sangat berharga, namun harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan tujuan akhir dari proses pendidikan. Strategi penerapannya perlu disesuaikan secara cermat dengan kondisi geografis daerah, ketersediaan sarana prasarana, akses jaringan, serta kemampuan dasar pengguna di lingkungan satuan pendidikan. **Kemendikbudristek (2023)** dalam laporannya menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam pendidikan tidak dapat disamaratakan secara seragam ke seluruh wilayah, melainkan harus disesuaikan dengan potensi dan tantangan yang ada di masing-masing daerah.

Untuk daerah yang memiliki akses internet terbatas atau infrastruktur yang belum memadai, pembelajaran berbasis kertas, media cetak, dan metode pembelajaran tradisional tetap menjadi pilihan yang sah dan perlu dihargai sebagai bentuk adaptasi. Sementara itu, di daerah yang sudah terjangkau jaringan dan memiliki fasilitas yang memadai, teknologi dapat diterapkan dengan desain yang sederhana, terintegrasi, dan tidak memberatkan. **Arsyad (2021)** menjelaskan bahwa pemanfaatan media pembelajaran akan efektif jika disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar, bukan hanya mengikuti tren perkembangan zaman semata.

Selain penyediaan sarana, peningkatan kompetensi juga menjadi aspek penting. Pelatihan dan pendampingan bagi guru serta staf administrasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap. **Sanjaya (2022)** menyatakan bahwa tanpa peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kehadiran teknologi justru akan menjadi beban tambahan dan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Dengan pendekatan yang kontekstual dan inklusif, teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meringankan beban kerja dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

C. Membangun Budaya Kerja dan Belajar yang Berbasis Esensi

Perubahan sistem dan kebijakan tidak akan memberikan hasil yang langgeng jika tidak disertai dengan perubahan pola pikir dan perilaku dari seluruh pihak yang terlibat. Diperlukan pembentukan budaya kerja dan budaya belajar yang mengutamakan pencapaian tujuan inti pendidikan, yaitu pengembangan potensi peserta didik, dibandingkan hanya terfokus pada kelengkapan administrasi semata. **Zamroni (2020)** berpendapat bahwa budaya organisasi yang sehat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, karena kebiasaan dan nilai yang dianut akan menentukan arah dan kinerja lembaga.

Pimpinan satuan pendidikan memiliki peran sentral dan harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip ini. Ketika pimpinan lebih menghargai kualitas proses pembelajaran dan perkembangan siswa dibandingkan ketebalan dokumen laporan atau kerapian administrasi semata, maka guru akan merasa didukung dan dapat lebih memusatkan perhatian pada tugas utamanya. Hal ini diperkuat oleh **Tilaar (2021)**, yang menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh sumber daya menuju pencapaian tujuan strategis, bukan sekadar menjaga formalitas prosedur.

Bagi siswa, perubahan budaya ini akan membantu mereka memahami makna hakiki dari kegiatan belajar, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bukan sekadar mengumpulkan nilai atau menyelesaikan tugas-tugas teknis. **Dimiyati dan Mudjiono (2022)** menegaskan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari hasil angka, tetapi dari perubahan perilaku dan kemampuan berpikir yang dimiliki peserta didik.

D. Peran Pendidik dan Pemangku Kebijakan

Guru dan tenaga kependidikan memiliki posisi ganda dalam sistem pendidikan: sebagai pelaksana kebijakan sekaligus sebagai agen perubahan yang mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan menyampaikan usulan penyederhanaan jika menemukan prosedur atau aturan yang tidak efektif, berbelit, atau justru menghambat kinerja. **Kunandar (2021)** menjelaskan bahwa profesionalisme guru tercermin dari kemampuannya untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem, bukan hanya melaksanakan perintah secara pasif.

Di sisi lain, pemangku kebijakan harus memiliki sikap terbuka dan bersedia mendengarkan aspirasi dari pihak pelaksana di lapangan. Proses penyusunan dan perbaikan aturan tidak boleh bersifat sepihak atau hanya berdasar pada pandangan di atas meja, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur. **Miarso (2020)** mengemukakan bahwa kebijakan yang disusun tanpa melibatkan pengguna di lapangan berisiko tinggi menjadi tidak relevan dan sulit diterapkan.

Evaluasi secara berkala juga menjadi kebutuhan mutlak agar sistem yang telah dibangun tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kerjasama yang harmonis dan saling mendukung antara pengambil kebijakan, pendidik, siswa, serta orang tua akan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, dinamis, dan produktif. Seperti yang dikemukakan oleh **Suryana (2023)**, keberhasilan sistem pendidikan sangat bergantung pada keterpaduan peran dan komunikasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Filosofi "*Gitu Aja Kok Repot*" bukanlah sikap santai atau malas, melainkan

pandangan mendalam yang berlandaskan pada humanisme Islam, prinsip wasathiyah, dan semangat kemudahan dalam ajaran agama.

2. Sistem pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan berupa birokrasi yang kaku dan penerapan teknologi yang sering kali tidak terintegrasi, sehingga justru menambah kerumitan bagi pendidik dan peserta didik.
3. Penerapan prinsip "*Gitu Aja Kok Repot*" relevan untuk menyederhanakan administrasi, mengintegrasikan sistem digital, menghilangkan dikotomi ilmu, serta membangun kebebasan berpikir.
4. Keberhasilan penyederhanaan sistem membutuhkan dukungan kebijakan yang baik, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta perubahan pola pikir seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik, disarankan hal-hal berikut:

1. Lembaga pendidikan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur dan sistem yang berlaku untuk menghilangkan kerumitan yang tidak perlu.
2. Penerapan teknologi informasi harus mengedepankan prinsip kesederhanaan, keterpaduan, dan kesesuaian dengan kondisi pengguna.
3. Semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, hingga orang tua, perlu membangun kesadaran bersama untuk kembali kepada esensi pendidikan sebagai sarana memerdekakan dan memanusiakan manusia.

4. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid. (2001). *Islam Kosmopolitan: Pandangan Baru tentang Hubungan Antarmanusia*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

Abdurrahman Wahid. (2005). *Mengembalikan Demokrasi ke Jalan yang Benar*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Abdurrahman Wahid. (2009). *Pendidikan dan Peradaban*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2020). *Transformasi Digital Pendidikan: Tantangan dan Peluang di Era Industri 4.0*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Darajat, Z. (2018). *Pemikiran Pendidikan Islam Gus Dur: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

- Hadi, S. (2022). *Birokrasi Pendidikan: Antara Efisiensi dan Efektivitas*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Madjid, N. (2017). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Muttaqin, A. (2021). *Humanisme Islam dalam Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Weber, M. (2018). *Teori Organisasi dan Birokrasi*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Basuki, A. (2018). *Filosofi Kesederhanaan dalam Pandangan Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Mulyasa, E. (2016). *Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Tingkat Dasar hingga Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, M. (2020). *Birokrasi Pendidikan: Antara Aturan dan Hakikat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyanto, H. (2021). *Beban Administrasi dan Kinerja Profesional Guru di Era Digital*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 45-58.
- Wijaya, A., & Susanto, B. (2022). *Transformasi Digital Pendidikan: Harapan dan Realitas di Lapangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.